



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.E  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN  
SUMBER DAYA AIR DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU PAPUA

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Sumber Air		
I.1.	Wilayah Sungai (WS)		
I.1.1.	WS Mamberamo-Tami-Apauvar (Papua-Papua Nugini)	WS Lintas Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>mendayagunakan sumber air berbasis WS Mamberamo-Tami-Apauvar yang melayani PKN Jayapura, PKW Arso, PKW Sarmi, dan PKW Wamena serta Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya</li><li>memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Mamberamo-Tami-Apauvar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</li><li>memanfaatkan ruang di sekitar WS Mamberamo-Tami-Apauvar secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Negara Papua Nugini</li><li>mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Mamberamo-Tami-Apauvar</li></ol>
I.1.2.	WS Einlanden-Digul-Bikuma (Papua-Papua Nugini)	WS Lintas Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>mendayagunakan sumber air berbasis WS Einlanden-Digul-Bikuma yang melayani PKW Merauke, PKW Muting, dan PKW Bade, serta Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya</li><li>memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Einlanden-Digul-Bikuma dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</li><li>memanfaatkan ruang di sekitar WS Einlanden-Digul-Bikuma secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Negara Papua Nugini</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.E - 2

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Einlanden-Digul-Bikuma
I.1.3.	WS Omba (Papua-Papua Barat)	WS Lintas Provinsi	a. mendayagunakan sumber air berbasis WS Omba yang melayani PKW Fakfak serta Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Omba dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. memanfaatkan ruang di sekitar WS Omba secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Provinsi Papua-Papua Barat yang berbatasan d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Omba
I.2.	Cekungan Air Tanah (CAT)		
I.2.1.	CAT Timika-Merauke	CAT Lintas Negara	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT Timika-Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika b. mengendalikan eksploitasi air tanah pada CAT Timika-Merauke yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.E - 3

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.2.2.	CAT Jayapura	CAT Lintas Negara	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT Jayapura yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom b. mengendalikan eksploitasi air tanah pada CAT Jayapura yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut
I.2.3.	CAT Agamanan	CAT Lintas Provinsi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT Agamanan yang berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Kaimana b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah
I.2.4.	CAT Kaimana	CAT Lintas Provinsi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT Kaimana yang berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kaimana b. mengendalikan eksploitasi air tanah pada CAT Kaimana yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut
II.	Prasarana Sumber Daya Air		
II.1.	Bendungan Beserta Waduknya	Prasarana Air Baku Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan	a. membangun dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan yang melayani Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.E - 4

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar bendungan beserta waduknya yang dapat mengganggu fungsi bendungan beserta waduknya
II.2.	Bendung	Prasarana Air Baku Kawasan Andalan	a. mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan di Bendung Wawan yang berada di Kabupaten Merauke b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar bendung yang dapat mengganggu fungsi bendung
II.3.	Embung	Prasarana Air Baku Kawasan Bergambut dan Pulau-Pulau Kecil Berpenghuni	a. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Supiori b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar embung yang dapat mengganggu fungsi embung
II.4.	Daerah Irigasi (DI)	Prasarana Air Baku Kawasan Andalan	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang dilakukan pada jaringan irigasi di: 1. DI Koya yang melayani PKN Jayapura dan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.E - 5

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>2. DI Kalibumi yang melayani PKW Nabire dan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Lagare); dan</li><li>3. DI Wariori yang melayani Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya</li></ul> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdianti